

MODUL AJAR PPKN

Nama Sekolah : SMKN 1 Palasah

Mata Pelajaran : PPKN

Kelas / Semester : X (Sepuluh) / Semester 1

Alokasi waktu : 4 X 45 menit (2 X Pertemuan)

INFORMASI UMUM

Elemen	UUD NRI 1945
Judul Unit	Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945
Kompetensi Awal	Peserta didik dapat menganalisis norma dan aturan, hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi dan norma yang berlaku, serta dapat mempraktikkannya; mempraktikkan membuat kesepakatan bersama di sekolah terkait dengan norma yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik; mengkaji ide-ide para pendiri bangsa tentang rumusan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; dan mengidentiikasi adanya kesesuaian, tumpang tindih, dan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya.
Profil Pelajar Pancasila	Profil Pelajar Pancasila terdiri dari enam dimensi, diantaranya: (1) Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia, (2) Berkebinekaan Global, (3) Mandiri, (4) Bergotong royong, (5) Bernalar kritis, dan (6) Kreatif.
Sarana dan Prasarana	PC/Laptop dengan aplikasi perkantoran telah terinstall contoh Ms. Officel, Printer Inkjet/Laserjet, dan peralatan kantor lainnya (telepon, fax, mesin photo copy)
Target Peserta Didik	Peserta didik reguler/Tipikal : umum
Model Pembelajaran	
Metode Pembelajaran	Diskusi Kelompok, Presentasi “Tamu” dan “Penjaga”, dan Broinstorming

KOMPONEN INTI

Tujuan Pembelajaran	Peserta didik mampu menguraikan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, sedikitnya, meliputi: a) Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum, b) UUD NRI Tahun 1945 merupakan konstitusi tertulis negara Indonesia, posisinya menjadi sumber hukum di Indonesia, dan c) contoh hubungan erat antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
Pemahaman Bermakna	UUD NRI Tahun 1945 merupakan turunan langsung dari lima sila dalam Pancasila. UUD NRI Tahun 1945 mengatur bagaimana pemerintahan diselenggarakan dengan maksud agar lima sila tersebut dapat terimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD NRI Tahun 1945 menerjemahkan secara langsung Pancasila dalam bentuk identiikasi hak-hak warga negara yang merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Posisinya sebagai aturan main bernegara dan sebagai penerjemahan langsung terhadap lima sila Pancasila. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi rujukan seluruh produk perundang-undangan di tingkat nasional dan daerah yang ada di Indonesia.
Pertanyaan Pemantik	1. Apa makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia? 2. Apa maksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia?

	3. Bagaimana kedudukan dan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945? 4. Berikan contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945!
Kegiatan Pembelajaran	1. Guru mengucapkan salam, berdoa, mengecek kehadiran peserta didik (presensi), memberi motivasi (apersepsi), menyampaikan tujuan dan manfaat, cakupan materi, langkah pembelajaran, dan teknik penilaian. 2. Guru menyampaikan kepada peserta didik mengenai materi yang akan dipelajari dan hubungannya dengan materi-materi sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyampaikan peta konsep yang telah dituliskan di atas. 3. Guru meminta peserta didik membuat kelompok diskusi. Setiap kelompok beranggotakan paling banyak lima orang. Setiap kelompok dipersilakan membaca materi, kemudian mendeskripsikan Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. 4. Presentasi hasil diskusi dilakukan dengan metode “Penjaga dan Tamu”. Guru meminta setiap kelompok menuliskan hasil diskusi kelompok dalam kertas plano dan menempelkannya di tembok secara berjauhan antarkelompok. 5. Guru meminta setiap hasil diskusi kelompok dijaga oleh dua anggota kelompok. Anggota kelompok yang lain dipersilakan untuk bertamu ke kelompok yang lain. Tugas penjaga adalah menjelaskan hasil diskusi kelompok dan memberikan jawaban atas pertanyaan tamu. Sedangkan yang bertamu bertugas mendengar penjelasan penjaga dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan penting. Hal ini dilakukan secara bersamaan oleh semua kelompok 6. Guru melakukan brainstorming dengan peserta didik, dengan cara mengajukan setidaknya tiga pertanyaan: a) Bagaimana rasanya menjadi penjaga dan tamu, apa kesulitannya; b) Apakah kalian semakin memahami materi tentang hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; dan c) Jelaskan contoh-contoh hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 yang dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. 7. Guru mengakhiri pertemuan dan membuat kesimpulan atas apa yang sudah dipelajari bersama.
Asesmen	a. Formatif dalam bentuk : b. Lembaran kerja siswa (untuk Diskusi), yaitu: c. Tes Tertulis (bentuk soal essay), yaitu : 1. Terangkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945! 2. Menurut kalian, apakah hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 selama ini sudah terjalin secara benar? 3. Berikan dua contoh yang menunjukkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dikaitkan dengan kehidupan kalian sehari-hari!
Pengayaan dan Remedial	▪ Pengayaan : diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal ▪ Remedial : diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang
Refleksi Peserta Didik dan Guru	1. Apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? 2. Apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran? 3. Apa saja kesulitan siswa yang dapat diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran? 4. Apakah siswa yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik? 5. Apa level pencapaian rata-rata siswa dalam kegiatan pembelajaran ini?

	6. Apakah seluruh siswa dapat dianggap tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran? 7. Apa strategi agar seluruh siswa dapat menuntaskan kompetensi?
--	---

LAMPIRAN

Lembar Kerja Peserta Didik	- Terlampir (Lampiran 1)
Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik	- Terlampir (Lampiran 2)
Glosarium	Pancasila, Ideologi, Falsafah, Sumber Segala Sumber Hukum, Sumber Hukum Tertinggi
Daftar Pustaka	- Buku PPKn Kelas X. Abdul Widl, dkk. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Pusat Kurikulum Dan Perbukuan - UUD NRI 1945

Kepala Sekolah

Palasah, Juli 2021
Guru Mata Pelajaran

Nana Surjana, S.Pd
NIP. 196405131988031009

Asmin, S.Pd
NIP. 196710071990031009

LAMPIRAN LAMPIRAN :

Lampiran 1 (Kerja Peserta Didik)

Nama : _____

Kelas : _____

Isilah kolom berikut ini:

3 Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Dua Sila dalam Pancasila	Pasal dan Ayat dalam UUD NRI Tahun 1945	Penjelasan Hubungan

Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Sila dalam Pancasila	Maknanya menurut Saya
Ketuhanan Yang Maha Esa	
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	
Persatuan Indonesia	
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan	
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	

Lampiran 2 (Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik)

RINGKASAN MATERI

Hubungan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Posisi Pancasila

Lima sila Pancasila dituliskan dengan tinta abadi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kelima sila tersebut digali dari nilai-nilai dan tradisi yang berkembang selama berabad-abad di negeri Indonesia. Nilai-nilai dan tradisi yang baik dirumuskan oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) kita dalam 5 sila. Pancasila menjadi landasan dalam pelaksanaan cita-cita berbangsa dan bernegara Indonesia Raya. Oleh karena itu, Pancasila menjadi sumber segala sumber hukum negara.

Kita bersyukur dipimpin oleh para pendiri bangsa yang arif dan visioner. Mereka menyadari tentang pentingnya menjaga kemajemukan demi persatuan Indonesia. Oleh karena itu, dalam Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945, mereka bersepakat mengubah rumusan sila pertama Pancasila ketika akan disepakati masuk dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dari yang semula “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” yang telah disepakati dalam Piagam Jakarta, diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta dasar ilsoi negara berarti setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Sejarah memberikan pelajaran yang berharga bagi kita. Setelah sila pertama Pancasila berubah, selanjutnya kearifan para pendiri bangsa turut mengubah dua hal. Kata “Mukadimah” dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 berubah menjadi “Pembukaan”. Dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang semula menetapkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam”, disepakati syarat beragama Islam tidak dimasukkan dalam pasal tersebut. Untuk Indonesia raya, maka kita jaga Indonesia dalam kebinekaan. Dan terasa Pancasila menjadi falsafah yang melandasi kelangsungan bangsa dan negara, karena para pendiri bangsa dan kita dapat membumikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kenyataan.



Gambar 2.3 Makna Pancasila sebagai ideologi, falsafah, sumber segala sumber hukum dan payung keberagaman

Pancasila adalah titik temu seluruh warga negara Indonesia, dari latar belakang apapun. Ia dapat menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Pancasila juga dapat menjadi asas tunggal dalam tatanan struktur dan kultur bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila menjadi keputusan inal sebagai landasan bangsa dan negara Indonesia.

Menurut Yudi Latief, Indonesia adalah contoh kongkret kemajemukan suatu bangsa. Pancasila menjadi perantara yang mampu menjadi ciri kebersamaan di tengah-tengah perbedaan yang ada. Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ideologi, sebagai instrumen pemersatu keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Pancasila adalah norma dasar (grundnorm) yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Maksudnya adalah kehendak mencari titik temu dalam menghadirkan kemaslahatan-kebahagiaan hidup bersama. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus menghadirkan negara untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, yang berdasar kepada kedaulatan rakyat dalam permusyawaratan perwakilan.

UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Dasar Hukum

Di bawah Pancasila adalah UUD NRI Tahun 1945. Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sangat erat. Lima sila Pancasila terpatritapi dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu pula, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak bisa diamandemen seperti Batang Tubuh dan Penjelasan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi, yang tunduk pada ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar hanya pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945, tidak termasuk Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila adalah bagian tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka dengan sendirinya tidak terdapat ruang untuk secara konstitusional mengubah Pancasila sebagai dasar negara. UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara.

Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila. Oleh karena itu, UUD NRI Tahun 1945 menjadi hukum dasar dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang disahkan di Negara Kesatuan

Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 3 UU nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maksud “hukum dasar” adalah norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pancasila bukan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan dasar hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pancasila tidak terdapat dalam hierarki karena ia adalah sumber dari segala sumber hukum. Dasar hukum tertinggi adalah UUD NRI Tahun 1945. Setiap pasal di dalamnya merujuk kepada nilai Pancasila, dan keberadaannya menjadi sumber bagi produk peraturan perundang-undangan yang lain.

Kita dapat menunjukkan beberapa pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, untuk menggambarkan pasal-pasal yang dirumuskan terkait erat dengan 5 sila Pancasila yang terekam dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 merupakan salah satu terjemahan dan sekaligus upaya pelaksanaan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 erat kaitannya dengan usaha pelaksanaan sila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Pasal 28 A sampai Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 berisi banyak jenis hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal-pasal tersebut erat kaitannya dengan upaya pemenuhan Sila Kedua Pancasila “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Pasal 1 tentang Bentuk dan Kedaulatan dan Pasal 25 tentang Wilayah Negara, semua diarahkan untuk melaksanakan Sila Ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”.

Ada banyak pasal yang mengatur kekuasaan pemerintah, seperti Pasal 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, dan Pasal 8 sampai Pasal 16. Pasal sebelumnya, yakni Pasal 2 dan Pasal 3 mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan banyak pasal lain yang mengatur lembaga-lembaga negara dan tata kelola pemerintahan. Pasal-pasal tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan Sila Keempat Pancasila “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Pasal 33 dan Pasal 34 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, menjadi penerjemahan dari pelaksanaan Sila Kelima Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Nantinya, kalau kita membaca banyak undang-undang dan produk peraturan perundang-undangan yang lain, semua diarahkan untuk menerjemahkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbit setiap tahun, misalnya, dimaksudkan agar tata kelola keuangan negara dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

INFO KEWARGANEGARAAN

UUD NRI Tahun 1945 selalu mendasarkan kepada Pancasila yang tertulis dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 beserta rangkaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Hukum tata negara, tata pemerintahan, hubungan negara dengan warga negara, yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, semua mendasarkan kepada 5 sila Pancasila. UUD NRI Tahun 1945 adalah hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 adalah norma dasar bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

